PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KHAIRIAN ANSHARI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **238643**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.290.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 537 m2/525 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 475 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 322.000.000**

1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**675.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**463.306.020**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**4.750.306.020**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**1.356.073.183**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.394.232.837**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.